



**Badan
Narkotika
Nasional**

Kota Banda Aceh

Laporan Kinerja

**Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh**

2021

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan serta merupakan tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebaga pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Banda Aceh.

Selama Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN) di Kota Banda Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024., yang dilakukan dalam upaya mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba.

Melalui kerja keras dan dukungan semua pihak, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah berhasil mencapai target sesuai yang diharapkan. Pencapaian target ini tidak lepas dari peran serta seluruh personil BNN Kota Banda Aceh dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan P4GN di Kota Banda Aceh.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga LKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan P4GN di Kota Banda Aceh khususnya dimasa yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan selanjutnya dan akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja BNN Kota Banda Aceh Tahun

2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan juga media evaluasi dalam menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, Januari 2022

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH**

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top and "KOTA BANDA ACEH" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features the word "KEPALA" in a bold, serif font. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending to the right.

HASNANDA PUTRA, ST, MM, MT

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.	4
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika	8
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2021	9
B. Rencana Kinerja 2021	12
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV.....	35
PENUTUP.....	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Kementerian yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional menetapkan sasaran strategis P4GN yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024. Adapun sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba
2. Sasaran 2 : Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan
3. Sasaran 3 : Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN
4. Sasaran 4 : Terselenggaranya Penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba
5. Sasaran 5 : Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai
6. Sasaran 6 : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Adapun Pagu Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebesar Rp 1.468.178.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.452.313.906,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus enam rupiah) atau sebesar 98,92 persen dari total anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kini berada dalam level status “Darurat Narkoba”, yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan narkoba yang harus segera ditangani secara intensif dan serius. Tidak hanya di Indonesia, di negara mana pun di dunia, masalah penyalahgunaan narkoba ditempatkan sebagai masalah kemanusiaan besar yang bersifat laten, melibatkan jejaring dan pelaku trans-nasional, dengan perputaran uang yang besar dan teknologi yang canggih, serta, yang terutama, membawa dampak kerusakan multi-dimensional.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan Indonesia berada dalam status Darurat Narkoba, salah satunya adalah letak geografis dan demografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Peredaran gelap narkoba kini menyasar ke seluruh kalangan masyarakat tidak hanya remaja dan dewasa melainkan juga anak-anak. Narkoba sebagai mesin pembunuh masal yang merusak manusia terutama fungsi kerja otak, fisik dan emosi manusia. Dan satu masalah lagi yakni sekarang ini Lapas yang seharusnya menghentikan laju peredaran gelap narkoba justru bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Dari semua itu, kerugian terbesar masalah penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang berarti melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa.

Indonesia berada di tengah gelanggang perang melawan masalah penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pada tahun 2018 terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6

Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, yang menjadi kerangka hukum berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) - secara fungsional dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah - terlibat dalam penanganan masalah narkoba.

Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 28 Februari 2020 telah menandatangani pembaharuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagai upaya pencegahan dari masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini di semua kalangan masyarakat baik di lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, maupun lingkungan pendidikan.

Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah) pemerintah daerah (pemerintah kota/kabupaten) memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan pemerintah kota/kabupaten adalah keniscayaan karena meskipun masalah penanganan narkoba termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum dan keamanan, yang notabene sebagai kewenangan pemerintah pusat, tetapi masalah-masalah yang timbulkannya terkait dengan kelangsungan pemerintahan daerah: masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kota/Kabupaten berkewajiban juga melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah narkoba di daerahnya masing-masing, khususnya terkait dengan penanganan upaya-upaya demand reduction - penanganan permasalahan narkoba tidak dapat hanya menggunakan pendekatan hukum, melainkan juga pendekatan kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dengan demikian Rencana Aksi Nasional P4GN merupakan langkah strategis menyatukan mewujudkan kota berkelanjutan sebagaimana **visi nasional:**

“Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045.”

Berdasarkan peranan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pemerintah daerah (selain komitmen dan *good-will*) adalah melalui penguatan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang baik; penguatan kebijakan daerah yang responsif terhadap ancaman kejahatan narkoba; pengembangan sarana atau fasilitas penanganan korban penyalahgunaan narkoba; penataan kawasan permukiman yang sehat dan aman; penguatan kelembagaan serta kapasitas masyarakat; dan lain sebagainya. Upaya-upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh berbagai bidang sehingga memberikan dampak berantai dan terukur.

Kemampuan kota/kabupaten merespons berbagai ancaman penyalahgunaan narkoba yang juga sebagai upaya pengayaan orientasi visi pembangunan **“Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045”** menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut mengingat ruang lingkup kota tanggap ancaman narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah; keseluruhan aspeknya merupakan substansi arah pembangunan kota. Maka, tingkat ketanggapan pemerintah daerah terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan wilayah, ketahanan lembaga, dan ketahanan hukum. Dasar penalaran bahwa ketanggapan pemerintah daerah menangani permasalahan narkoba menjadi salah satu poin penting dalam melaksanakan P4GN, BNN — selaku vocal point atau leading-sector penanganan permasalahan narkoba di Indonesia — menyelenggarakan pengkajian Indeksasi Kota

Tanggap Ancaman Narkoba. Kajian yang bertitik tolak pada sumber daya yang tersedia di masing-masing kota/kabupaten tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk BNN meningkatkan kinerja dan perluasan jaringan dalam penanganan permasalahan narkoba.

B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Banda Aceh dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP serta dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hokum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pelayanan Administrasi BNNK/Kota; dan
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan BNNK/Kota.

4. Kewenangan

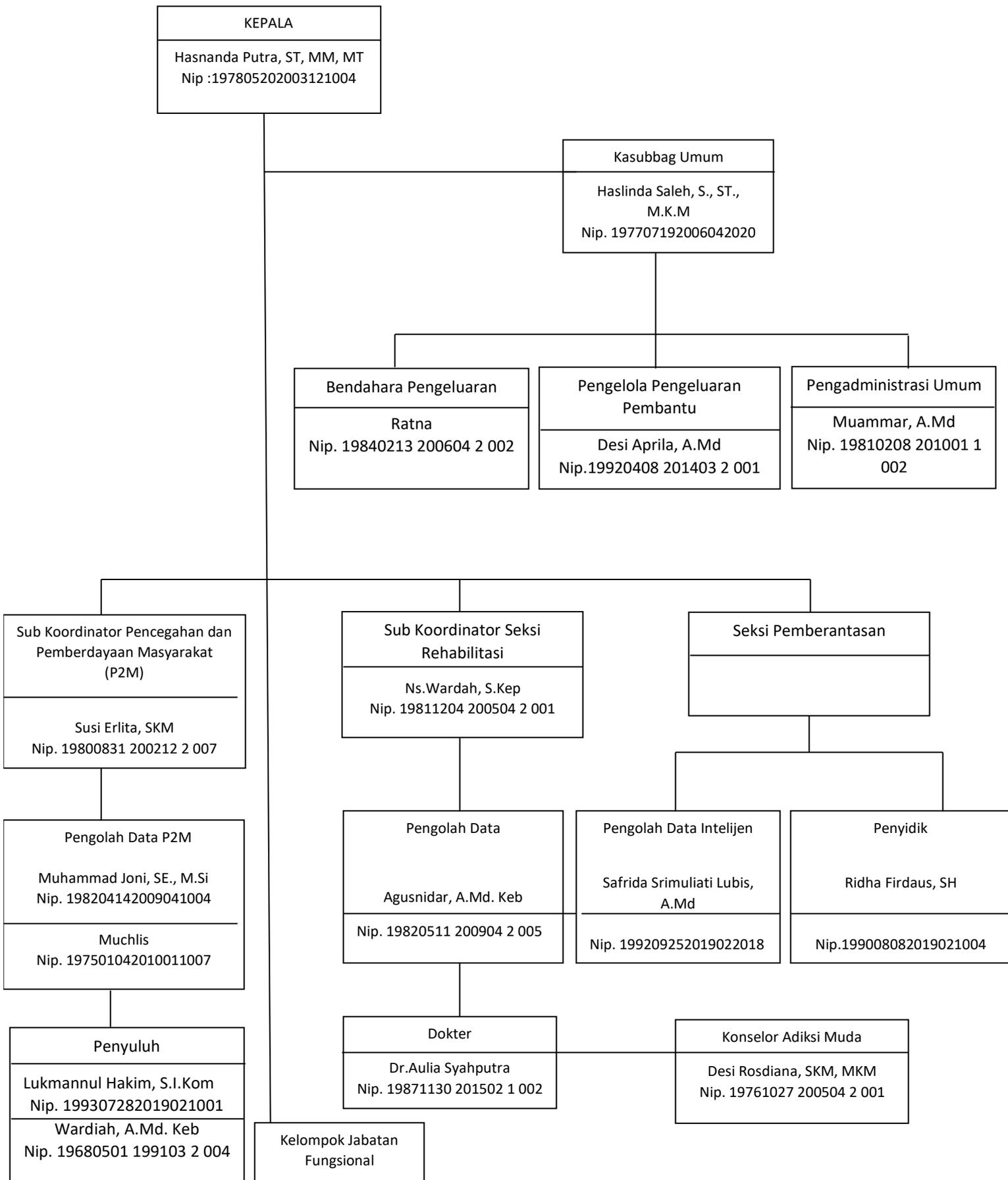
Kewenangan BNN Kota Banda Aceh secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang – Undang adalah tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Banda Aceh.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Subbag Umum
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Rehabilitasi
5. Seksi Pemberantasan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH



E. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup BNN Kota Banda Aceh serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolak ukur kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia beserta seluruh sumber daya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran :lokal, regional, nasional bahkan global.

A. Rencana Strategis 2021

Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengacu pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program tahunan. Sebagai instansi vertikal, rencana strategik (Renstra) Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dan merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

Untuk mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah, sebagai cita-cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menetapkan visi sebagai berikut:

1. Visi

VISI	“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”
-------------	--

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menetapkan misi yang harus dilaksanakan.

2. Misi

MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. 2. Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 3. Melaksanakakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. 4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.
-------------	---

3. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	<p><i>Meningkatnya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara efektif di Kota Banda Aceh</i></p>
--------------------------	---

4. Outcome dan Indikator Kinerja

Hasil / Outome	IndikatorKinerja
1. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	1. Laju angka penyalah guna narkoba coba pakai
2. Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	1. Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dakan pelaksanaan P4GN
3. Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh lagi	1. Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi

4. Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba	1. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap
5. Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional	1. Nilai Kinerja Anggaran BNN

Berkenaan dengan sasaran tersebut di atas, arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah :

Arah Kebijakan	<p>a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara <i>demand reduction</i> dan <i>supply reduction</i></p> <p>b. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggungjawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.</p>
-----------------------	--

<p>Strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kebijakan tersebut tahun 2021 adalah sebagai berikut: Strategi</p>	<p>a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba kedalam seluruh isu dan sector pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba kedalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.</p> <p>b. Menumbuh kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.</p> <p>c. Melaksanakan tatakelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan BNN.</p>
--	---

B. Rencana Kinerja 2021

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Proinsi Aceh dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,49
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	0
5	Meningkatnya aksebilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2	3	4
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan Kklinik Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	0
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Banda Aceh	90
9	Meningkatnya tata kelola dan administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BNN Kota Banda Aceh	94

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada awal tahun anggaran 2021, BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di seluruh satker lingkungan BNN, termasuk BNN Kota Banda Aceh. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BNN Kota Banda Aceh ditetapkan dengan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Ketujuh sasaran kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan stakeholder serta 2 (dua) sasaran kegiatan pendukung manajemen.

Berikut gambaran capaian setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Capaian Kinerja BNN Kota Banda Aceh Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50	52,25	104,5
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	77,857	98.9

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,49	3,49	100
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	0	0	0
Meningkatnya akseibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh	3,2	3,2	100
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	0	0	0
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Banda Aceh	90	83.31	92
Meningkatnya tata kelola dan administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BNN Kota Banda Aceh	94	97.78	104

Capaian kinerja BNN Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2021, diuraikan melalui pemantauan langsung kepada para penerima program melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan juga melalui masukan baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, dan hasil masukan dari penerima program dilakukan analisis data yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

1.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika

Capaian sasaran kegiatan tersebut diatas, diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50.00	52,25	104.5

Sasaran Strategis Direktorat Informasi dan Edukasi adalah meningkatnya daya tangkal remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Informasi dan Edukasi adalah Indeks Ketahanan Diri Remaja. Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi Self Regulation, Assertiveness dan Reaching Out dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi

dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap 100 orang remaja usia 13-21 tahun pelajar di 9 SMP sederajat dan 1 SMA yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh BNN Kota Banda Aceh

Dari target yang ditetapkan 50 dapat terealisasi sebesar 52.25 atau sebesar 104.5%.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2021

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
1	BNNP ACEH (NAD)	48.16	Rendah
	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	50.54	Tinggi
	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.69	Rendah
	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	43.44	Sangat Rendah
	BNN KOTA SABANG	48.45	Rendah
	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.06	Rendah
	BNN KOTA LANGSA	52.15	Tinggi
	BNN KABUPATEN BIREUEN	50.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	49.40	Rendah
	BNN KABUPATEN PIDIE	48.14	Rendah
	BNN KOTA BANDA ACEH	52.25	Tinggi
	DEKTARI PROV. NAGGROE ACEH DARUSSALAM	49.22	Rendah

Penyebab keberhasilan:

1. Kemampuan BNN Kota Banda Aceh dalam menggunakan dana program secara optimal.
2. Siswa di 10 sekolah yang dilakukan sosialisasi dan penyuluhan responsif terhadap kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh penyuluh dan seksi P2M BNN Kota Banda Aceh.
3. Jalinan komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang berkomitmen dalam menggalakkan program P4GN di Kota Banda Aceh.

Rencana aksi kedepan:

- a. Penekatan atau instruksi dari kementrian atau lembaga di pusat sangat membantu pelaksanaan program di daerah karena masing masing kementrian lebih tunduk pada perintah yang bersifat

hierarkhi atau vertikal ketimbang lintas sektoral dengan alasan efisiensi anggaran:

- b. Relawan sangat perlu diberikan dukungan anggaran untuk memotivasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri:

<h1>2.</h1>	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahguna dan peredaran gelap narkotika

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	77,857	98.9

Program ketahanan keluarga anti narkoba salah satu bentuknya adalah intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba. Kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba ini bertujuan untuk mendorong semua anggota keluarga (orang tua dan anak) untuk meningkatkan kualitas keterampilan hidup anggota keluarga tentang keterampilan pola pengasuhan orang tua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan pola hidup sehat dalam keluarga.

Pelaksanaan kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba (*lifeskill*) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan setelah pembentukan fasilitator. Hal ini dimaksud agar keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mencegah pengaruh buruk dari lingkungan sosial. Tujuan dari peningkatan keterampilan hidup adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi anggota

keluarga yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk meningkatkan kualitas pengasuhan, kualitas diri anak maupun kualitas di dalam keluarga.

Terdapat beberapa komponen dalam pelaksanaan kegiatan intervensi 26 keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang meliputi anggota keluarga, fasilitator, narasumber, materi, media dan evaluasi. Di dalam kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba semua materi terkait ketahanan keluarga disampaikan saat pertemuan dengan tetap dilakukan pendampingan oleh fasilitator selama kegiatan intervensi berlangsung. Peserta yang telah mengikuti intervensi ketahanan keluarga diharapkan memiliki keterampilan baru maupun penguatan akan keterampilan yang dimiliki sebelum intervensi. Intervensi Keterampilan Hidup Keluarga Anti Narkoba dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan pada Desa Bersinar (Bersih Narkoba), sehingga dapat mendorong masyarakat memiliki ketahanan keluarga anti narkoba untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba.

Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi *mobile* Dektara Aja terhadap 5 orang tua dan 5 anak usia 13-18 tahun di Gampong mulia dengan bantuan dari seksi P2M Kota Banda Aceh.

Dari target yang ditetapkan 78,67 dapat terealisasi sebesar 77.857 atau sebesar 98,9%.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4235/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) PER PROVINSI
TAHUN 2021**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	78,482	TINGGI
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	76,161	RENDAH
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	78,125	TINGGI
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	79,375	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	91,429	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	82,321	TINGGI
7	BNN KOTA LANGSA	91,429	SANGAT TINGGI
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	82,321	TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	75,625	RENDAH
10	BNN KABUPATEN PIDIE	77,679	TINGGI
11	BNN KOTA BANDA ACEH	77,857	TINGGI

Penyebab Keberhasilan :

1. Kemampuan BNN Kota Banda Aceh dalam menggunakan dana program secara optimal.
2. 5 Keluarga yang dilakukan sosialisasi dan penyuluhan responsif terhadap kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh penyuluh dan seksi P2M BNN Kota Banda Aceh.
3. Jalinan komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan pihak Gampong Mulia yang berkomitmen dalam menggalakkan program P4GN di Kota Banda Aceh.

3.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Capaian sasaran kegiatan tersebut diatas, diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,49	3,49	100

Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Pegiat Anti Narkoba.

Kegiatan yang dilakukan bidang P2M dalam mencapai Indeks Kemandirian Partisipasi antara lain :

1. Rapat Kerja dan Bimtek Penggiat Anti Narkoba di 4 Lingkungan, Lingkungan Masyarakat, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan.
2. Deteksi dini Tes urine di Instansi Pemerintah
3. Survei Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pengukuran indeks kemandirian partisipasi masyarakat melalui survey Iktan. Dari target yang ditetapkan 3,49 dapat terealisasi sebesar 3,49 atau sebesar 100%.

Data Indeks Partisipasi (IKP) TA 2021
BNN Kota Banda Aceh

No	Instansi/Organisasi	Lingkungan	IKM	Katagori	Keterangan
1	DPMG BANDA ACEH	INSTANSI PEMERINTAH	3.49	SANGAT MANDIRI	
2	DP3AP2KB BANDA ACEH	INSTANSI PEMERINTAH	3.48	SANGAT MANDIRI	
3	DISDIK DAYAH BANDA ACEH	INSTANSI PEMERINTAH	3.72	SANGAT MANDIRI	
4	PT POS INDONESIA BANDA ACEH	SWASTA	3.48	SANGAT MANDIRI	
5	PT LION PARCEL	SWASTA	2.82	MANDIRI	
6	SMPN 6 BANDA ACEH	INSTANSI PENDIDIKAN	3.94	SANGAT MANDIRI	
7	SMPN 14 BANDA ACEH	INSTANSI PENDIDIKAN	3.85	SANGAT MANDIRI	
8	DINAS PENDIDIKAN BANDA ACEH	INSTANSI PENDIDIKAN	3.45	SANGAT MANDIRI	
9	GAMPONG MULIA	MASYARAKAT	3.69	SANGAT MANDIRI	
10	GAMPONG Kp. BARU	MASYARAKAT	3.33	SANGAT MANDIRI	
11	GAMPONG DEAH GLUMPANG	MASYARAKAT	3.12	MANDIRI	
	TOTAL		38.37		

Penyebab Keberhasilan :

1. Kemampuan BNN Kota Banda Aceh dalam menggunakan dana program secara optimal.
2. Kredibilitas dan kepercayaan/trust masyarakat terhadap satker sangat mempengaruhi keberhasilan program, nama baik, aksi nyata yang dilakukan sangat membantu dalam publikasi pesan tentang pentingnya pengetahuan tentang bahaya narkoba.
3. Insert conten sangat membantu sehingga dapat menyebarkan informasi kepada banyak orang dengan biaya yang kecil karena menumpang pada kegiatan orang lain

4.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Capaian sasaran kegiatan tersebut diatas, diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100

Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah adalah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Klinik milik BNN dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah yang

menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah mampu dan telah melakukan layanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara berkesinambungan serta memenuhi standar pelayanan minimal ditandai dengan telah dilakukannya penilaian oleh Tim dari Dinas Kesehatan Pemda Kota Banda Aceh serta oleh Tim dari Deputi Rehabilitasi.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 1 Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah yang Operasional dapat terealisasi 100% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Layanan Rehabilitasi
Lembaga Rehabilitasi Instansi
Pemerintah (LRIP) yang Operasional
Tahun 2021

No	Jenis LRIP	Nama dan Alamat LRIP	Status (IPWL/Non IPWL)	Jumlah Klien Selesai Program
1.	Klinik Pratama	Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh / Jln. K. Saman, Gampong Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	IPWL	13 Klien

Penyebab keberhasilan:

- a. Pasien yang tidak melapor dilakukan penjemputan (interfensi);
- b. Penanganan pasien melibatkan perangkat desa setempat;
- c. Meningkatnya kesadaran dari klien untuk menyelesaikan tahapan proses layanan rehabilitasi rawat jalan.

d. Peningkatan layanan kepada klien telah dilakukan dengan baik oleh SDM yang ada di Klinik Pratama.

Capaian tahun 2021 jumlah fasilitasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional yakni 1 lembaga.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan konseling pada klien menjadi tidak maksimal. Beberapa kali klien konseling melalui *video call*.
- b. Klien tidak datang ke Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh untuk menjalani proses rawat jalan medis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. Klien masih enggan untuk datang ke Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, karena mereka masih menganggap aib bagi dirinya dan keluarganya.
- d. Kurangnya dorongan dari keluarga sehingga klien kurang termotivasi untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan.
- e. Klien tidak mudah kita hubungi karena tidak mempunyai hp.
- f. Terdapat 2 orang klien yang relapse dalam jangka waktu 6 bulan karena klien telah bekerja di luar kota. Namun, konseling tetap dilakukan dengan pendekatan khusus oleh petugas rehabilitasi.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Pelaksanaan IBM mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna narkoba dengan pemberdayaan kekuatan lokal yang bertumpu pada peran keluarga dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan IBM mencakup kegiatan non-layanan dan kegiatan layanan. Pelaksanaan IBM terdiri atas rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap oleh AP.

Hasil dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan IBM sebagai berikut :

- a. Fase perkembangan unit IBM
Merupakan hasil diskusi dengan petugas BNNP/ Kab/ Kota tentang pelaksanaan kegiatan, layanan dan tata kelola IBM. Evaluasi dilakukan kepada 306 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 Kabupaten/ Kota, termasuk yang masuk dalam program Operasionalisasi IBM (Prioritas Nasional). Fase perkembangan unit IBM terbagi menjadi 5, yaitu Fase Rintisan, Tumbuh, Berkembang, Tangguh dan Prima. Bagi unit IBM yang belum memenuhi indikator dalam fase perkembangan, disebut sebagai Pra Fase.
- b. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat
Merupakan hasil survey menggunakan platform Google Form kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM terhadap lingkungan dan masyarakat.
- c. Peta followership Satuan Kerja BNN di wilayah dalam program IBM
Merupakan hasil kajian dokumen laporan perkembangan unit IBM serta diskusi dengan petugas BNNP/ Kab/ Kota pada saat pelaksanaan Evaluasi IBM. Peta followership ditentukan setiap provinsi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari BNNP serta BNN Kab/ Kota.
- d. Temuan berdasarkan hasil evaluasi
Merupakan kendala dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2022.

Pengukuran Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM dari target yang ditetapkan 1 Lembaga dapat terealisasi sebesar 3,1 Lembaga atau sebesar 100%.

**CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN IBM REGULER TAHUN 2021**

No	Provinsi	Satker Pembina	Nama IBM	Desa/ Kelurahan	Capaian Fase
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mulia	Gampong Mulia	Tangguh
2		BNN Kab. Pidie Jaya	Anti Narkoba	Gampong Jurong Teungoh	Tangguh
3		BNN Kab. Bireuen	IBM Jangka Mesjid	Gampong Jangka Mesjid	Tangguh
4		BNN Kota Lhokseumawe	IBM Desa Hagu Barat Laut	Gampong Hagu Barat Laut	Berkembang
5			IBM Desa Mon Geudong	Gampong Mon Geudong	Berkembang
6			Gampong Blang Cut	Gampong Blang Cut	Pra Fase
7			IBM Desa Meunasah Mesjid	Gampong Meunasah Mesjid	Berkembang
8		BNN Kab. Aceh Tamiang	IBM Kampung Dalam	Kampung Dalam	Tangguh
9		BNN Kab. Pidie	Benteng Jaya	Gampong Benteng	Tangguh
10		BNN Kota Langsa	IBM Gampong	Gampong Sungai Pauh Pusaka	Berkembang
11		BNN Kab. Aceh Selatan	Blackstone	Gampong Batu Itam	Berkembang
12			Puncak Gemilang	Gampong Lhok Bengkuang Timur	Berkembang
13			Hulu Pisang Bersinar	Gampong Hulu Pisang	Berkembang
14		BNN Kab. Gayo Lues	IBM Kampung Badak	Kampung Badak	Berkembang
15		BNN Kota Sabang	Sapeu Pakat	Gampong Batee Shoek	Prima

5.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diukur melalui indikator kinerja kegiatan berikut ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh	3,2	3,2	100

Hasil survey di klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh masyarakat yang beraktifitas di Pelayanan Publik. Data yang digunakan dalam analisis selanjutnya diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang telah disebar. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

oleh klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh yang dipilih merupakan masyarakat yang telah mendapat pelayanan di klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil Data Survei Kepuasan Masyarakat, didapatkan bahwa :

HASIL PENGUKURAN

No	Satker	Jlh Responden	Target	Hasil IKM
	BNN Aceh	58	3,2	3,33
1	BNN Provinsi Aceh	19	3,2	3,29
2	BNN Kota Sabang	2	3,2	3,20
3	BNN Kota Banda Aceh	4	3,2	3,27
4	BNN Kabupaten Pidie	4	3,2	3,26
5	BNN Kabupaten Pidie Jaya	10	3,2	3,36
6	BNN Kabupaten Bireuen	7	3,2	3,28
7	BNN Kota Lhokseumawe	3	3,2	3,20
8	BNN Kota Langsa	1	3,2	3,80
9	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	6	3,2	3,76
10	BNN Kabupaten Gayo Lues	1	3,2	3,10
11	BNN Kabupaten Aceh Selatan	1	3,2	3,15

Penyebab keberhasilan:

- a. Kemudahan memperoleh informasi layanan rehabilitasi
- b. Petugas telah melaksanakan layanan rehabilitasi sesuai dgn rawatan yg telah disepakati
- c. Rencana rawatan disusun atas kesepakatan antara klien dan petugas
- d. Petugas klinik pratama bnn kota banda aceh berperilaku sopan
- e. Kebersihan sarpras lembaga rehabilitasi cukup terjaga
- f. Jenis layanan yg dijalani sesuai dengan kebutuhan klien

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan konseling pada klien menjadi tidak maksimal. Beberapa kali klien konseling melalui *video call*.

- b. Klien tidak datang ke Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh untuk menjalani proses rawat jalan medis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. Klien masih enggan untuk datang ke Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, karena mereka masih menganggap aib bagi dirinya dan keluarganya.
- d. Kurangnya dorongan dari keluarga sehingga klien kurang termotivasi untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan.
- e. Klien tidak mudah kita hubungi karena tidak mempunyai hp.
- f. Terdapat 2 orang klien yang relapse dalam jangka waktu 6 bulan karena klien telah bekerja di luar kota. Namun, konseling tetap dilakukan dengan pendekatan khusus oleh petugas rehabilitasi.

6. Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Capaian sasaran kegiatan diatas, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berikut ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Kinerja anggaran BNN	90	83.31	92

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Capaian indikator kinerja kegiatan BNN Kota Banda Aceh Tahun 2021 dalam nilai kinerja anggaran adalah 83.31 atau sebesar 92%. Adapun perhitungan aspek implementasi adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Pengukuran	Capaian
1.	Penyerapan	98,92
2.	Konsistensi	83,2
3.	Capaian Realisasi Output	100
4.	Efisiensi	1,08
5.	Nilai Efisiensi	52,7
NILAI KINERJA ANGGARAN		83,31

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait indikator kinerja serta petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
2. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

7.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya tata kelola dan administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Capaian sasaran kegiatan diatas, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berikut ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BNN Kota Banda Aceh	94	97,78	104

Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan anggaran belanja merupakan kewajiban kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran.

Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Capaian indikator kinerja kegiatan BNN Kota Banda Aceh Tahun 2021 dalam nilai kinerja anggaran adalah 97.78 atau sebesar 104 %. Adapun perhitungan aspek implementasi adalah sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Dispensasi SPM	100	5	5
2	Up	100	8	8
3	Data Kontrak	0	0	0
4	Kesalahan SPM	80	5	4
5	Retur	100	5	5
6	Halaman III DIPA	78.27	5	3.91
7	Revisi DIPA	100	5	5
8	Kemajuan Tagihan	0	0	0
9	Rekon LPJ	100	5	5
10	Realisasi	100	15	15
11	Rencana Kas	0	0	0
12	Pagu Minus	100	5	5
13	Konfirmasi Capaian Output	100	17	17
Nilai Total				72.91
Bobot Konversi				75%
Nilai Akhir (Nilai Total/Bobot Konversi)				97.22

Penyebab Keberhasilan :

1. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNN Kota Banda Aceh sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNN Kota Banda Aceh.
2. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
3. Dukungan dan peran serta aktif para *stakeholder* dalam melaksanakan program P4GN.
4. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan setiap bulannya guna mengetahui sejauh mana capaian, kendala, hambatan dalam realisasi kegiatan dan anggaran BNN Kota Banda Aceh.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait indikator kinerja serta petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
2. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran BNN Kota Banda Aceh 2021, sebesar **Rp 1.468.178.000,-** (Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp **1.452.313.906,-** (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus enam rupiah) atau sebesar **98,92%** untuk mendukung 2 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) meliputi 1 jenis belanja yaitu:

Tabel

Realisasi Anggaran BNN Kota Banda Aceh Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
52 Belanja Barang	1.468.178.000	1.452.313.906	15.864.094	98.92
Total	1.468.178.000	1.452.313.906	15.864.094	98.92

Adapun gambaran penyerapan anggaran berdasarkan sasaran kegiatan per bidang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel

Komposisi Pagu BNN Kota Banda Aceh per Bidang Tahun 2021

Belanja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Subbag Umum	956.407.000	955.501.106	905.894	99,90
Seksi P2M	360.440.000	358.453.000	1.987.000	99,44
Seksi Rehabilitasi	151.331.000	138.359.800	12.971.200	91,42
Total	1.468.178.000	1.452.313.906	15.864.094	98,92

- ❖ Dukungan anggaran dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi P4GN dan peningkatan kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba serta terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi atau lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba adalah sebesar Rp. 360.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 358.453.000,- atau sebesar 99,44%. Penyerapan anggaran yang optimal harus sejalan juga dengan tercapainya indikator kinerja kegiatan, sehingga sasaran kegiatan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
- ❖ Dukungan anggaran dalam sasaran terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai dengan alokasi sebesar Rp. 151.331.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.359.800 atau sebesar 91,42%.
- ❖ Sementara itu untuk dukungan anggaran sasaran terselenggaranya proses manajemen yang efektif dan efisien sebesar Rp. 956.407.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 955.501.106,- atau sebesar 99,90%.

Dari sisi pengelolaan Kinerja dan Anggaran, BNN telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai dengan fungsi yang ada. Secara umum target kinerja anggaran Satker telah terlaksana.

Adapun grafik capaian kinerja dapat terlihat seperti gambar dibawah, yang mana data diambil dari Aplikasi SMART TA. 2021.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sebagai pelayanan publik sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja 2021 dengan mengacu pada rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024..

Kunci keberhasilan Capaian program dan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang disajikan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tahun 2020 tersebut karena adanya dukungan dan komitmen dari 3 (Tiga) Bagian Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu : 1) Bagian Umum 2) Bagian Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat 3) Bagian Rehabilitai serta serta pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sedangkan kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stake holders, sehingga kehadiran Badan Narkotika Nasional di Kota Banda Aceh semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh**



Hasnanda Putra, ST, MM, MT